

IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA TOAPAYA KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020

Mohammad Suherfin¹, Kustiawan², Handrisal³

Muhammadsuherfin10@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

This research aims to understand the implementation of the cash labor intensive program in Toapaya Village, Toapaya District, Bintan Regency in 2020. The background of this research is due to village development and creating jobs, so the village government issues regulations governing the Toapaya village workforce for the 2020 fiscal year. This study uses the theory of Van Meter and Van Horn. The study uses a qualitative descriptive research method. Primary data obtained by means of interviews and observations and secondary data obtained from written reports and publications. The results showed that the implementation of the village cash labor intensive program had not run as a whole, this was because the data provided was not re-checked so that people who were able to continue to participate in water channel construction activities and the lack of supervision carried out by the village government resulted in still the occurrence of a worker recruitment process that is not in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Implementation, Programme, Cash labor intensive*

I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, politik, dan partisipasi dalam kehidupan di masyarakat pedesaan, masalah kemiskinan harus diselesaikan. Badan pusat statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per maret 2020 mengalami kenaikan sebesar 26,42%, pemerintah dituntut untuk merentas kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar masyarakat bisa menghidupi kehidupannya.

Memasuki tahun keempat diimplementasikannya undang-undang desa, ternyata kemiskinan cukup tinggi. Pemerintah memberikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkan keputusan bersama 4 menteri yaitu:

1. Menteri Dalam Negeri (Nomor 140-8698 Tahun 2017)
2. Menteri Keuangan (Nomor 954/KMK.07/2017)
3. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Nomor 116 Tahun 2017)

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017) tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan penekanannya tentang Padat Karya Tunai.

Dari Surat Keputusan Bersama 4 Menteri ada 1 peraturan Menteri yang membahas PKTD yaitu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. PKTD disebutkan dalam Pasal 1 No. 29 dan Bab V pembinaan, pemantauan, dan evaluasi yaitu pelaksanaan pembangunan desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu undang-undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. (undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa) Peraturan kementerian desa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dengan memprioritaskan pembangunan dengan pola padat karya tunai.

Padat karya tunai desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

- a. PKTD diprioritaskan bagi:
 1. Anggota keluarga miskin
 2. Pengangguran
 3. Setengah penganggur
- b. Anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi (stunting)
- c. Memberikan kesempatan kerja sementara
- d. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa menggantikan pekerjaan yang lama
- e. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa
- f. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal dan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

Desa toapaya kecamatan toapaya merupakan salah satu desa dikabupaten bintang yang melaksanakan PKTD pembangunan normalisasi parit Kp.Jawa Anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan prasarana ini sebesar Rp.137.914.916,00. Kegiatan ini bertujuan agar bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Dalam program Padat Karya Tunai desa Toapaya memiliki 5 Mandor dan juga 53 pekerja. Tenaga kerja juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian sebagai perlindungan kerja selama melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan sudah diputuskan melalui Keputusan Kepala Desa Toapaya (Nomor 38 Tahun 2020) tentang Tenaga kerja Desa Toapaya tahun anggaran 2020.

Kegiatan Program Padat Karya Tunai Desa melalui Pembangunan Desa, para pekerja yang didalamnya tidak memerlukan skill khusus karena pada hakikatnya PKTD adalah Bantuan Langsung Tunai yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk kerja-kerja konkret. tujuan program ini yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat agar memberikan pekerjaan melalui kegiatan pembangunan secara swaseloka. tujuan dari program PKTD juga memberikan rasa kebersamaan serta gotong royong dengan sumber daya ekonomi dan sosialnya, pembangunan desa ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Tabel 1. Pagu Anggaran Normalisasi Parit Kp.Jawa Desa Toapaya

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dibayar honor jasa guru gambar normalisasi parit Kp.Jawa desa toapaya	2.989.916
2.	Dibayar upah pekerja untuk kegiatan normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya	117.000.000
3.	Dibayar upah mandor untuk kegiatan normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya	13.375.000
4.	Dibayar belanja papan nama kegiatan untuk kegiatan normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya	350.000
5.	Dibayar belanja prasasti untuk kegiatan normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya	1.000.000
6.	Dibayar operasional untuk kegiatan normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya	2.900.000
7.	Dibayar BPJS Ketenagakerjaan untuk kegiatan normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya	300.000

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021.

Peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020 dalam Keputusan Kepala Desa Toapaya (Nomor 38 Tahun 2020) tentang Tenaga kerja Desa Toapaya tahun anggaran 2020 dengan menggunakan model *Van Meter dan Van Horn* yang didasarkan pada enam buah variabel

Seperti 1). Standar dan sasaran kebijakan 2). Sumber daya 3). Karakteristik organisasi pelaksana 4). Sikap para pelaksana 5). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Moleong, 2012). dengan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Informan pada penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan, Tenaga Kerja, Mandor, dan Masyarakat.

Tabel 2. Informan Penelitian
Informan yang akan diwawancarai

No	Informan	Jumlah Orang
1.	Sekretaris Desa	1 orang
2.	Ketua Pelaksana Kegiatan	1 orang
3.	Tenaga kerja	2 orang
4	Mandor	2 orang
5.	Masyarakat	2 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dengan menggunakan Teori yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan *A Model Of The Policy Implementation*. Menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik antara lain:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Identifikasi Indikator-Indikator Kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis Implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan sejauh mana tujuan kebijakan ini telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan kebijakan secara menyeluruh. Tujuan dari Surat Keputusan Kepala Desa No. 38 Tahun 2020 itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di desa dengan memanfaatkan masyarakat desa tempatan yang dilakukan secara swakelola dan mengatur pelaksanaan pembangunan desa agar menjadi lebih efisien selain tujuan kebijakan standar keberhasilan juga mempengaruhi kebijakan yang sudah dibuat oleh Kepala Desa Surat Keputusan Kepala Desa No.38 Tahun 2020 tujuannya untuk masyarakat miskin namun melalui observasi peneliti masih terdapat beberapa kesalahan yaitu masyarakat memiliki pekerjaan tetap sementara banyak juga masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan padahal banyak masyarakat desa toapaya yang ingin ikut program padat karya tunai desa tersebut kemudian dapat dilihat juga orang yang ikut juga memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan mandor. dilihat bahwa standar kebijakan yang tercantum di Peraturan Desa Toapaya belum sepenuhnya direalisasikan dengan baik.

2. Sumber Daya

Keberhasilan Implementasi Kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan Implementasi Kebijakan. Setiap kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Sumber Daya Manusia

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses Implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

dapat dikatakan dalam hal sumber daya manusia sudah berjalan baik karena sudah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai karena sudah dimusyawarahkan dan dibentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membantu dalam melaksanakan tugas serta pengawasan para pekerja.

2. Sumber Daya Finansial

Diluar sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhatikan juga, yaitu sumber daya finansial, ketika sumber daya manusia yang berkompeten sudah tersedia sedangkan aliran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang akan menjadi persoalan untuk merealisasikan sesuatu yang menjadi tujuan kebijakan publik.

Untuk sumber implementasi Keputusan Kepala Desa Toapaya anggaran sudah ditetapkan yaitu anggaran untuk mandor dan juga pekerja dalam rapat serta disosialisasikan bersama masyarakat, ketika sudah dilapangan mandor dan juga tim pelaksana kegiatan melakukan pengawasan dan juga monitoring yang dilakukan selama 1 minggu sekali dalam 1 bulan pengerjaan berlangsung, untuk pembagian upahnya bisa sehari atau seminggu sekali tergantung dari hasil kesepakatan para pekerja, diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya finansial sangat baik serta sudah dimusyawarahkan sehingga kecil kemungkinan terjadinya gagal implementasi yang menjadi tujuan kebijakan publik.

3. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu merupakan peranan yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, saat sumber daya manusia yang baik dan anggarannya sudah sangat rinci serta berjalan dengan bagus tetapi terhambat oleh waktu, maka dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan dalam implementasi kebijakan. Untuk sumber daya waktunya sendiri sebelum dibuatnya Surat Keputusan Kepala Desa memang program ini di dapatkan dari surat edaran yang ada dipusat setelah itu Ketua Pelaksana bersama Kades membuat RKP Desa dalam waktu 1 tahun kemudian di musyawarahkan kepada mandor dan masyarakat untuk menentukan berapa lama proses pengerjaannya yaitu selama 30 hari.

Pada indikator kedua ini untuk Sumber Daya sudah berjalan dengan baik dapat di lihat sudah ada sruktur pelaksana penanggungjawab, sumberdaya pekerja, biaya dan waktu pelaksanaan yang cukup.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik Organisasi Pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang, aspek yang diteliti lebih lanjut dari karakteristik organisasi pelaksana adalah *Standar Operating Procedure* (SOP) Program Padat Karya Tunai Desa.

1. *Standar Operating Procedure* (SOP)

SOP mengenai pelaksanaan Keputusan Kepala Desa dan juga proses untuk menjadi calon pekerja sudah cukup jelas namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya perlu adanya peingkatakan ketegasan yang dilakukan pemerintah Desa untuk menindak RT dan RW yang

melanggar atau bekerja tidak sesuai SOP begitu juga untuk RT dan RW perlu meningkatkan pemahaman agar mempermudah terwujudnya tujuan kebijakan. Dari hasil observasi peneliti dilapangan memang tidak semua RT dan RW yang melakukan hal demikian RT dan RW yang bekerja sesuai SOP juga ada , terdapat beberapa RT dan RW yang melakukan tugasnya dengan baik dengan melihat keadaan masyarakatnya apakah benar-benar sudah mampu atau tidak mampu kemudian di data sehingga setelah diberikan ke Pemerintah Desa bahwa memang masyarakat nya benar-benar tidak mampu dan bisa memenuhi sasaran sesuai yang sudah dibuat Peraturan Desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat.

2. Pengawasan

Dalam mengelola program ini pihak pelaksana bekerja secara tim yang dibagi menjadi 5 mandor disetiap lokasi, dimana Ketua Pelaksana sebagai penanggung jawab serta memberikan arahan kepada anggotanya selama menjalankan program ini dan untuk dilapangan mandor mengawasi setiap para pekerja yang berbeda dari setiap lokasi. Yang terjadi dilapangan tidak demikian berdasarkan hasil observasi banyak para pekerja yang mengeluhkan tentang mandor sering tidak hadir di lokasi padahal hal ini sangat perlu untuk menilai sejauh mana kemampuan para pekerja untuk menyelesaikan pembangunan yang ada didesa tersebut. Pada Indikator ketiga ini Karakteristik Organisasi Pelaksana belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari masih adanya kesalahan pelanggaran Sop yang di lakukan mandor pelaksana yaitu RT dan RW sebagai penanggungjawab karena masih ada pekerja dengan data lama yang belum diupdate dan tahapan seleksi tidak ketat, serta masih lemahnya pengawasan dari BPD sehingga hal tersebut bisa terjadi pengawasan yang dilakukan oleh mandor juga kurang baik karena banyaknya keluhan para pekerja tentang mandor yang tidak hadir dilokasi.

4. Komunikasi antar organisasi terkait

Implementasi akan berjalan secara efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memperhatikan kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang di komunikasikan dengan berbagai komunikasi.

1. Ketepatan Komunikasi dengan para pelaksana

Komunikasi awal yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan diadakan program padat karya tunai desa yaitu pembuatan saluran air yang ada di Kp. Jawa dan juga menghimbau mulai dari poster serta media untuk memberikan informasi bahwa yang mengikuti program ini adalah untuk masyarakat miskin.

Informasi yang disampaikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Desa dalam penentuan kelompok sasaran diantaranya :

1. Dalam sosialisasi kepada masyarakat selalu diberitahu bahwa kegiatan pembuatan salur air hanya untuk masyarakat miskin dan pengangguran.
2. Berbagai himbauan Pemerintah Desa di media bahwa sasaran kebijakan para pekerja hanya untuk masyarakat miskin dan pengangguran hal ini ditujukan agar masyarakat luas mengetahui siapa yang menjadi sasaran kebijakan para pekerja.

2. Konsistensi atau keseragaman informasi yang dikomunikasikan

Pemerintah Desa Toapaya sudah menunjukkan ukuran dan sasaran kebijakan yang jelas, namun masih terdapat ketidaktegasan dari Ketua Pelaksana untuk menindak atau memberikan sanksi bagi

RT dan RW yang sebenarnya sudah mengetahui tetapi masih memberikan kesempatan kepada orang yang sudah mampu dan itu tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan diatas.

Pada Indikator keempat ini Komunikasi antar Organisasi terkait masih belum berjalan dengan baik karena pada implementasinya dilapangan masih belum sinkron sengan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan masih ada mis komunikasi dan pemahaman antara Ketua pelaksana di Desa, RT dan RW sebagai mandor dan BPD sebagai pengawas.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap dan arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang (*crucial*). *Implementor* mungkin bisa menjadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi suatu tujuan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974). Sebaliknya, Penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut , adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap suatu keberhasilan Implementasi kebijakan. Pada akhirnya intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. bahwa pemahaman akan kebijakan hanya dimiliki oleh mandor, RT, dan juga RW sedangkan sebagian RT dan RW kurang mengerti serta memahami akan sasaran dan tujuan kebijakan, dengan begitu akan sulit bagi RT dan RW untuk menjelaskan kepada masyarakat akan kebijakan tersebut, hal ini juga dilakukan observasi peneliti ketika melihat data yang diberikan oleh RT dan RW, mereka hanya menjelaskan mendapatkan data-data dari warga setempat dan tidak melakukan pengecekan ulang, sedangkan melakukan pengecekan ulang itu sangat perlu agar bisa mengetahui apakaharganya sudah mampu atau tidak.

Pada indikator kelima ini Sikap Para Pelaksana juga masih belum berjalan dengan baik dapat di lihat pertama pada saat musyawarah RT dan RW belum dapat menjelaskan secara detail kepada masyarakat sehingga masih ada rasa tidak serius masyarakat yang ikut. Serta melihat masih ada pekerja yang sudah ikut namun tidak ada kesadaran diri untuk serius mengikutinya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Terakhir yang diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Untuk itu dalam upaya implementasi kebijakan juga memperhatikan kondisi lingkungan eksternal dalam penelitian ini, lingkungan ekonomi sosial dan politik yang akan diteliti adalah para pekerja, dan alasan mengapa masih mengikuti kegiatan pembuatan saluran air padahal sudah mampu. Dan sebenarnya hal tersebut bukan merupakan sasaran kebijakan program Padat Karya Tunai Desa dalam kegiatan pembuatan saluran air, serta himbauan pemerintah desa kepada masyarakat.

1. Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial masyarakat di Desa Toapaya menggambarkan masyarakat yang hidup rukun dan saling menghargai serta saling tolong menolong. Kehidupan masyarakat kebanyakan bergantung pada sektor pertanian dan hortikultura. Pada saat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia kondisi sosial masyarakat agak terganggu karena banyak sekali yang orang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Akan tetapi masyarakat tetap mendukung upaya desa untuk membantu masyarakatnya yang lagi kesusahan. Dengan melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah kegiatan Padat Karya Tunai Desa. Masyarakat sangat ingin mendukung semua kegiatan yang dapat membantu kehidupan sosial.

2. Lingkungan Ekonomi

Dampak dari Pandemi covid-19 membuat masyarakat Desa Toapaya merasakan imbasnya, mulai dari kurangnya penghasilan, tidak ada lapangan pekerjaan, dan harus bertahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan hal tersebut pemerintah Desa Toapaya mencoba untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya yaitu melalui Program Padat Karya Tunai. Desa melakukan kegiatan Padat Karya Tunai pembersihan saluran air di Kp.Jawa. Untuk lingkungan ekonomi yang sangat harus diatasi. Semua masyarakat sangat membutuhkan penghasilan tambahan, pada kondisi seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat mau tidak mau adalah mengikuti kegiatan saluran air yang ada di Kp. Jawa karena pemikiran masyarakat hanya melihat dari nominal bukan dari sasaran yaitu untuk masyarakat miskin dan pengangguran, begitu juga dengan nominalnya dibayar perhari secara tunai dengan harga 100.000 ketika pengerjaannya selama 30 hari maka merupakan salah satu alasan masyarakat tetap melakukan kegiatan pembuatan saluran air yang ada di Kp.Jawa tersebut.

3. Lingkungan Politik

untuk politik sendiri sebenarnya tidak ada ikut campur karena program ini di dapatkan langsung dari kementerian, jadi Desa itu sendiri yang mengelola secara swakelola dan di tunjuk Ketua Pelaksana bersama Kepala Desa untuk membuat secara detail kegiatan tersebut. lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dalam kondisi ekonomi masyarakat memang perlu adanya kegiatan desa yang dapat melibatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi dan tidak ada kaitan politik di dalam hal tersebut.

Pada indikator keenam ini Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari lingkungan sosial yang selalu mendukung pemerintah desa serta kondisi ekonomi yang memang lagi melemah pada saat pandemi. Serta tidak terlalu terpengaruh kondisi politik.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020 pada indikator pertama standar dan sasaran kebijakan yang sudah ada masih belum berjalan dengan baik karena masih ada kesalahan yaitu orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan tetap masih ikut terlibat. Serta beberapa orang yang ikut memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan mandor.

Kemudian Pada indikator kedua ini untuk Sumber Daya sudah berjalan dengan baik dapat dilihat sudah ada struktur pelaksana penanggungjawab, sumberdaya pekerja, biaya dan waktu pelaksanaan yang cukup. Selanjutnya Pada Indikator ketiga ini Karakteristik Organisasi Pelaksana belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari masih adanya kesalahan pelanggaran SOP yang dilakukan mandor pelaksana yaitu RT dan RW sebagai penanggungjawab karena masih ada pekerja dengan data lama yang belum diupdate dan tahapan seleksi tidak ketat, serta masih lemahnya pengawasan dari BPD sehingga hal tersebut bisa terjadi.

Selanjutnya pada Indikator keempat ini Komunikasi antar Organisasi terkait masih belum berjalan dengan baik karena pada implementasinya dilapangan masih belum sinkron dengan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan masih ada mis komunikasi dan pemahaman antara Ketua pelaksana di Desa, RT dan RW sebagai mandor dan BPD sebagai pengawas.

Serta pada indikator keenam ini Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari lingkungan sosial yang selalu mendukung pemerintah desa serta kondisi

ekonomi yang memang lagi melemah pada saat pandemi. Serta tidak terlalu terpengaruh kondisi politik.

Jadi dari enam indikator pengukuran implementasi kinerja kebijakan publik yang ada, di tarik kesimpulan yaitu terdapat dua hal yang sudah berjalan dengan baik dan empat hal yang masih belum berjalan dengan baik. Sehingga sudah memiliki landasan yang cukup baik untuk kebijakan publik namun belum terselenggara dengan sistematis.

V. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Anderson, J. (1994). *Public policymaking*. Houghton Mifflin.
- Budiasa, A. A. G. R., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71–82. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1431>
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publication.
- Darmawan, E., Septian, D., & Pratama, R. A. (2017). *Kebijakan sektor publik*. UMRAH Press.
- Dunn, W. (2008). *Public policy analysis : An introduction* (4th ed.). Pearson, Prentice Hall.
- Dunsire, A. (1978). *Implementation in a bureaucracy*. Palgrave Macmillan.
- Dye, T. (1972). *Understanding public policy*. Prentice-Hall.
- Edward, G. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Herdiyana, D. (2019). Implementasi padat karya tunai dalam menurunkan penduduk miskin di pedesaan provinsi lampung dan riau. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 16(02), 175–187. <https://doi.org/10.25134/EQUI.V16I02.2193>
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy analysis for the real world*. Oxford University Press.
- John, L., & Lyn, L. (2006). Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. In *Belmont, Calif.: Wadsworth*. <https://doi.org/10.1177/089124196025003006>
- Lofland, John., & Lofland, L. H. (1995). *Analyzing social settings : A guide to qualitative observation and analysis*. Wadsworth.
- Meilinawati, D. T. (2018). Analisis partisipasi masyarakat dalam program padat karya di Kecamatan Magelang Utara. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(2), 84–96. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/338>
- Meter, D. S. van, & Horn, C. E. van. (1975). The policy implementation process : A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(445).
- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1973). *Politics of Policy Implementation*. University of California Press.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy : Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen politik kebijakan publik* (6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Pressman, J., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. University of California Press.
- Ripley, R. B., Franklin, G. A., & Ripley, R. B. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Brooks/Cole.

- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 538–560.
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 25–35. <https://doi.org/10.21787/MP.4.1.2020.25-35>
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Yanti, D. (2019). *Pelaksanaan program padat karya tunai berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri tentang penyalarsan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)*. <http://repository.uin-suska.ac.id/18595/>

Dokumen

- Keputusan Kepala Desa Toapaya Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tenaga Kerja Desa Toapaya Tahun Anggaran 2020
- Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa Tahun 2018
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Puji syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas limpahan berkat dan rahmat karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari perkuliahan hingga pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA. selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
2. Bapak Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Assist Prof Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Assist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc. dan Bapak Assist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan skripsi ini.
5. Serta Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang selama dalam masa perkuliahan telah memberikan Ilmu dan Pengalaman kepada saya, dan juga kepada seluruh staff yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Kedua Orang Tua Saya yaitu Almarhum Bapak Saya dan Ibu Surainah yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi yang tiada henti kepada saya
7. Pihak Pemerintah Desa Toapaya yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Desa Toapaya.

8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 dan sahabat yang telah banyak membantu memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Begitu juga seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan berkat atas kebaikan saudara/i semuanya, serta semoga skripsi ini memiliki manfaat bagi kita semuanya.